

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arsyad, Jawada Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Butarbutar, Elizabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Danil, Elwi, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok.
- Effendy, Marwan, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, PT.Timpani Publishing, Jakarta.
- , 2014, *Teori Hukum: Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Iskandar, Nandan, 2012, *Pengaruh Opini Publik (Public Opinion) Terhadap Penegakan Hukum*, Miswar, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok.
- Manthovani, Reda, 2017, *Kumpulan Catatan Hukum*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2015, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2009, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- O.C.Kaligis, 2015, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, PT.Alumni, Bandung.
- Patittingi, Farida dan Jurdi, Fajlurahman, 2016, *Korupsi Kekuasaan : Dilema Penegakan Hukum Diatas Hegemoni Oligarki*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2003, *Panduan Transparency International 2002 : Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integrasi Nasional*, alih Bahasa Masri Maris, Jakarta, Transparency International dan Yayasan Obor Indonesia.
- Pramono, R. Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana lainnya : Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Probo, Pradhana, dan Asyhari, M.Al, 2019, *Menjegal Koruptor : Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pertarungan Politik Di Indonesia*, PT.Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2010, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 2018, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2005, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2005, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suhendi, Hendi *et all.*, 2017, *Penguatan terhadap Efektivitas Tugas dan Wewenang TP4 sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Miswar, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Suparni, Niniek *et all.*, 2014, *Penerapan Hukum Progresif Oleh Lembaga Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana*, Miswar, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Syarif, Laode M., *et.all*, 2015, *Hukum Anti Korupsi*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation.
- Wahyudi, Bambang Setyo, 2017, *Indonesia Mencegah: Upaya Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II: Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Datun*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjojanto, Bambang, 2018, *Berantas Korupsi Reformasi*, Intrans Publishing, Malang.

Yusni, M., 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/ PUU-XIV/ 2016 tentang pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-019/ A/ JA/ 09/ 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-345/A/JA/11/2019 tentang Pencabutan KEPJA Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebagaimana telah diubah dengan KEPJA Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas KEPJA Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4.

Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-007/A/JA/11/2019 tentang Pelaksanaan KEPJA Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan KEPJA Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebagaimana telah diubah dengan KEPJA Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas KEPJA Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4.

Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis.

C. Jurnal

Ekodaniarto, 2017, *Peran TP4D Kejaksaan Negeri Kota Magelang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Khilman, Iman, 2016, *Peran Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Panjoko, Raka Buntasing, 2017, *Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah*, Tesis, Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

- Beritasatu, Jaksa Agung Ungkap Alasan Pembubaran TP4, <https://amp.beritasatu.com/nasional/591142/jaksa-agung-ungkap-alasan-pembubaran-tp4/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2020.
- Cnnindonesia.com, KPK Tahan Jaksa Kejari Yogyakarta Terkait Suap TP4D, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190820235857-12-423222/kpk-tahan-jaksa-kejari-yogyakarta-terkait-suap-tp4d>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020.
- Indopolitika, TP4 Resmi Dibubarkan Oknum Aparat Nakal Tak Punya ATM Proyek Lagi, <https://indopolitika.com/tp4-resmi-dibubarkan-oknum-aparat-nakal-tak-punya-atm-proyek-lagi/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2020.
- Kabar24.bisnis, Mau Bubarkan TP4 Jaksa Agung Minta Masukan Pakar, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191108/16/1168324/mau-bubarkan-tp4-jaksa-agung-minta-masukan-pakar>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020
- Kejaksaan, Amanat Jaksa Agung RI Pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 Tahun 2015, <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=176&hal=8>, diakses pada tanggal 4 November 2019.
- Kejari Jakbar, Pengertian TP4D, <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian-tp4d>, diakses pada tanggal 4 November 2019.
- Liputan 6, Langkah Preventif TP4 Kejaksaan Dinilai Efektif Cegah Korupsi , <https://www.liputan6.com/news/read/4041649/langkah-preventif-tp4-kejaksanaan-dinilai-efektif-cegah-korupsi>, diakses pada tanggal 13 November 2019.
- Liputan 6, Mahfud MD Sambangi Kejagung Pastikan Pembubaran TP4, <https://www.liputan6.com/news/read/4115507/mahfud-md-sambangi-kejagung-pastikan-pembubaran-tp4>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
- Media Indonesia, Jaksa Agung Diminta Perkuat Pencegahan, <https://mediaindonesia.com/read/detail/268131-jaksa-agung-diminta-perkuat-pencegahan>, diakses pada tanggal 13 November 2019.

Media Indonesia, Pemerintah Apresiasi Pengawalan TP4,
<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/264487-pemerintah-apresiasi-pengawalan-tp4>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020

Nawacitalib.com, TP4 Sudah Dibubarkan Kini Hadir Satgas Pengamanan
Investasi Kejaksaan, *<https://nawacitalib.com/2020/06/22/tp4-sudah-dibubarkan-kini-hadir-satgas-pengamanan-investasi-kejaksaan>*, diakses
pada tanggal 15 Juli 2020.

Republika, Jaksa Agung Pertimbangkan Bubarkan TP4,
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q0ljwa430>,
diakses pada tanggal 13 Juli 2020.